

Membangun Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Baru yang Berlandaskan Pancasila : Menuju Indonesia Emas 2045

Rizqy Anggara Wicaksono; Josep Arviando Munthe; Muhamad Rafly Kurniawan; Vicho Yunanda Hidayat; Akmalul Arifin; Universitas Pradita, muhamad.rafly@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: The relocation of the capital city of the Republic of Indonesia has been a prominent issue since the era of Soekarno's leadership until now. Although it has been proposed repeatedly, the implementation of this idea has always encountered obstacles in the past. However, with Indonesia approaching its 100 years of independence, the effort to relocate the capital city becomes increasingly relevant as preparation for the future. The relocation of the capital city is expected to create a new governmental center and promote equitable development throughout Indonesia, reduce development disparities between regions, and open up new economic opportunities beyond Java Island. The selection of Kalimantan as the new location for the capital city is considered a strategic step towards realizing Indonesia's Vision 2045. The relocation of the capital city is expected to be crucial in realizing Indonesia's vision as a developed and highly competitive country by 2045 while improving the quality of life for the people and addressing existing environmental challenges. The research methodology used in this study includes qualitative methods using a literature review to analyze the concepts, challenges, and implementation of the new capital development. Discussions include relocating the capital city and the objectives and targets of Indonesia's capital development. This project is based on the principles of Pancasila as a philosophical foundation, to create an inclusive, just, and sustainable capital city. Therefore, the relocation of the capital city is expected to be a significant milestone in realizing Indonesia's vision as a developed and highly competitive country by 2045, while improving the quality of life for the population and addressing existing environmental challenges.

KEYWORDS: Ibu Kota Nusantara (IKN), Pancasila, Indonesia Emas 2045, Development Equity, Economic Opportunities

ABSTRAK: Pemandahan ibu kota Republik Indonesia telah menjadi isu yang mengemuka sejak era kepemimpinan Soekarno hingga sekarang. Meski telah diwacanakan berulang kali, implementasi dari ide ini selalu menemui kendala di masa lalu. Namun, dengan semakin dekatnya Indonesia dengan 100 tahun kemerdekaannya, upaya pemandahan ibu kota negara menjadi semakin relevan sebagai bagian dari persiapan menuju masa depan. Pemandahan ibu kota negara diharapkan tidak hanya menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan membuka peluang ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Pemilihan Kalimantan sebagai lokasi baru ibu kota negara baru

dinilai sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemindahan ibu kota yang diharapkan akan menjadi sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan negara yang berdaya saing tinggi pada tahun 2045, sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi tantangan lingkungan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka untuk menganalisis konsep, tantangan, dan implementasi pembangunan ibu kota baru. Pembahasan meliputi gagasan pemindahan ibu kota, serta tujuan dan sasaran pembangunan ibu kota Indonesia. Proyek ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan filosofis, dengan tujuan menciptakan sebuah ibu kota yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemindahan ibu kota diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengatasi tantangan lingkungan yang ada.

KATA KUNCI: Ibu Kota Nusantara (IKN), Pancasila, Indonesia Emas 2045, Pemerataan Pembangunan, Peluang Ekonomi

I. PENDAHULUAN

Rencana untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, namun telah ada sejak masa pemerintahan Soekarno (1957), Soeharto (1997), hingga Susilo Bambang Yudhoyono (2010). Usulan untuk memindahkan pusat administrasi negara dari Jakarta selalu timbul dan terus terkait dengan agenda pembangunan nasional, meskipun pada akhirnya hanya menjadi bagian dari berbagai diskusi tanpa tindakan konkret (Herdiana, 2022).

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya dalam menciptakan peradaban baru untuk Indonesia yang akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam menyambut seratus tahun kemerdekaan Indonesia, tentu sangat penting untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang matang dalam menunjang keberhasilan Indonesia untuk melahirkan sumber unggul sebagai upaya membangun generasi emas menuju Indonesia 2045. Selain itu, pemindahan ibu kota juga dapat diartikan sebagai langkah strategis untuk menstimulasi pembangunan di wilayah timur Indonesia, mengurangi ketidaksetaraan/kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta memberikan peluang ekonomi dan investasi baru di luar Pulau Jawa. (Muharam, 2023).

Menurut Shalih, pandangan bahwa pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dilakukan bersama Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yakni Joko Widodo, di Istana Negara. Ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah pusat untuk melakukan penelitian terhadap proses pemindahan IKN, mengingat situasi sosial dan lingkungan di Kota Jakarta saat ini dianggap tidak memadai (Shalih, 2018). Meskipun tentu saja, pemindahan IKN menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun secara substansial, jika kita mempertimbangkan masa depan Indonesia, negara ini akan menghadapi bonus demografi penduduk pada tahun 2045.

Penyebab utama yang memicu timbulnya masalah kompleks di ibu kota adalah tingginya jumlah penduduk. Situasi ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam berbagai bidang (Ridho, 2020). Selain itu,

bencana banjir, krisis air bersih, penurunan tanah, kemacetan, dan tingginya tingkat urbanisasi menjadi masalah yang rumit dan terus mengganggu masyarakat Jakarta saat ini (Suciatingrum, 2019). Berdasarkan dinamika ini, Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan dengan harapan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh penduduk ibu kota dan negara secara keseluruhan (Farisa, 2022a).

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dipilih sebagai landasan filosofis untuk membangun ibu kota baru ini. Hal ini menegaskan komitmen untuk menjaga keberagaman dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat identitas nasional Indonesia dalam konteks pembangunan ibu kota baru. Mencerminkan tekad pemerintah Indonesia untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Visi ini ditetapkan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju yang sejahtera dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045, yang merupakan peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya menuju Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing tinggi pada tahun 2045.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep dan penerapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlandaskan Pancasila menuju Visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses, tantangan, dan implikasi dari pembangunan ini bagi masyarakat dan negara.

II. METODE

Penelitian memiliki beragam metode yang digunakan dalam pelaksanaannya (Darmalaksana, 2020c). Secara umum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian, yaitu kualitatif (Gunawan, 2013) dan kuantitatif (Prasetyo & Jannah, 2019).

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Pendekatan penelitian (Nazir, 1988) yang dipilih adalah kualitatif (Gunawan, 2013) melalui analisis studi pustaka (Cawelti, 1969). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber bacaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan kerangka penelitian yang telah ditetapkan (Darmalaksana, 2020a).

Dipilihnya metode kualitatif karena membantu memperluas pemahaman kita tentang gagasan membangun ibu kota negara baru yang berbasis Pancasila. Metode ini memungkinkan kita secara menyeluruh untuk mempelajari keyakinan, prinsip, dan perspektif.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman lebih lanjut mengenai aspek sosial tertentu yang mempengaruhi pembangunan ibu kota negara baru. Penelitian ini melakukan studi pustaka dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara baru yang berlandaskan visi Indonesia Emas 2045. Kerangka konseptual dari penelitian ini didasarkan pada buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Kerangka konseptual ini akan digunakan sebagai landasan untuk analisis data di bagian berikutnya. Metode ini kami gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai beberapa aspek pandangan pembangunan IKN.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam menghadapi era globalisasi dan kompleksitas dinamika geopolitik, keberadaan ideologi Kebangsaan Nasional menjadi fundamental bagi pembentukan identitas dan stabilitas negara. Sebagai pijakan filosofis dan moral, IKN merujuk pada Pancasila sebagai

landasan dan panduan utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, "Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan suatu pandangan hidup" (Purnama, S. J., & Chotib. 2022, December 2). Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan arah bagi pembangunan nasional, menjelma sebagai prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan fondasi filosofis yang kokoh bagi pembangunan bangsa, termasuk dalam proyek pemindahan Ibukota negara ke Nusantara. Pancasila didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan untuk menjaga martabat dan hak-hak setiap warga negara Indonesia. Tujuan ini bertujuan agar setiap individu dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia, memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya, serta mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Selain itu, Pancasila bertekad untuk memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan taraf kehidupan secara keseluruhan melalui penerapan prinsip keadilan sosial.

Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan program nasional yang digagas pemerintah Indonesia. Ibukota Nusantara dibangun untuk mencapai Visi Indonesia 2045 secara maksimal. Gagasan pemindahan ibu kota kepulauan (IKN) ke luar Pulau Jawa pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957. Indonesia ini besar, Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mendirikan ibu kota negara baru. Namun ide Soekarno tidak pernah membuahkan hasil.. Saat itu Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang Nomor 10 yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1964 yang menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia (Nainggolan, E. U. 2022, January 25).

Rencana pemindahan ibu kota terus berlanjut. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto juga pernah mengajukan gagasan pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keputusan ini mendukung rencana pengembangan kota mandiri seluas 30 ribu hektar di Jonggol, Jawa Barat, yang diprakarsai oleh salah satu putra Soeharto, Bambang Trihatmodjo (Firman, 1997). Dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru

pada Mei 1998, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak terlaksana.

Selama masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ide untuk memindahkan IKN muncul lagi seiring dengan isu kemacetan dan banjir yang terjadi di Jakarta. Diskusi tentang relokasi ibukota negara harus mempertimbangkan berbagai faktor, bukan hanya berfokus pada masalah kemacetan dan banjir di Jakarta. Untuk mendistribusikan pembangunan secara merata di seluruh negeri, ini juga harus dilihat sebagai tindakan strategis. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mulai serius menangani isu ini sebagai cara untuk meratakan pembangunan ekonomi, populasi, dan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jokowi memilih untuk memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa pada 29 April 2019 dan memasukkannya ke dalam RPJMN 2020–2024 (Nainggolan, E. U., 2022, Januari 25).

Inisiatif besar ini tidak hanya berkaitan dengan relokasi pusat administratif, tetapi juga merupakan tindakan strategis untuk mencapai perkembangan yang merata di seluruh kepulauan. Terdapat tiga fase yang terjadi pada periode ini: mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan ibu kota negara pada masa reorganisasi, mempertahankan Jakarta sebagai IKN tetapi memindahkan ibu kota ke daerah lain, dan pembentukan IKN baru. Ketimpangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi titik sentral dalam pemikiran Presiden. IKN tidak hanya merubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga berjuang untuk transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang siap (Tysara, L. 2023, Desember 13).

Visi Ibukota nusantara adalah menjadi kota kelas dunia dalam segala aspek pembangunan dan pengelolaannya, dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia dan penggerak perekonomian Indonesia dimasa depan, serta menjadi simbol perekonomian Indonesia dan juga sebagai simbol identitas nasional. Secara resmi berdasarkan Pancasila sebagai landasan hukumnya dan mewakili keberagaman Indonesia.

IKN memiliki tiga tujuan: menjadi kota yang berkelanjutan di tingkat global, menjadi kota yang mendorong ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas bangsa (Fadillah, 2022).

Begitu juga, aspek yang mendukung dalam keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan menjadi pemicu utama di balik keputusan bersejarah ini. Pemindahan ibu kota dapat memacu pertumbuhan di wilayah lain dan mengurangi ketimpangan yang ada. Banyak faktor memengaruhi keputusan untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Beberapa faktor utama yang mendorong pemindahan ini akan dieksplorasi secara spesifik dari berbagai sumber diantaranya sebagai berikut.

Pertama, mengatasi hambatan di masa depan. Sesuai Visi Indonesia 2045, khususnya Indonesia Maju, perekonomian Indonesia diharapkan masuk 5 besar perekonomian dunia pada tahun 2045. Pada tahun tersebut, PDB per kapita diperkirakan mencapai 30.000 dolar AS. Pada tahun 2045, diperkirakan Indonesia berhasil keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, transformasi ekonomi diperlukan agar mewujudkan Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi ini didukung oleh industri hilir yang memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan peraturan, dan reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024. Oleh karena itu, diperlukan modal Indonesia yang mampu mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut (Kamalina, 2023).

Kedua, IKN mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, termasuk di wilayah timur Indonesia. Selama bertahun-tahun, Jakarta dianggap sebagai pusat dari banyak hal, termasuk politik, pemerintahan, ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Dengan luas hanya 664,01 km², atau 0.003 persen dari total 1.919.440 km² daratan Indonesia, perputaran uang di Jakarta mencapai 70%. Ini tidak mengejutkan. Sementara itu, jumlah penduduknya adalah 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa berdasarkan data tahun 2020 (Sugiarto, 2022).

Keadaan saat ini membawa perubahan yang timpang, pertumbuhan dan perekonomian di Indonesia. Jakarta dan Pulau Jawa menjadi pusat pembangunan. Situasi ini berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, tidak

memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, tidak mendukung keadilan antardaerah, dan dapat merugikan persatuan bangsa (Ayundari, 2022). Oleh karena itu, kita memerlukan kota kelas dunia bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai ibu kota Indonesia yang mampu menjawab tantangan tersebut. Ibu Kota Nusantara di Kalimantan dianggap sebagai pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, termasuk di wilayah tengah dan timur. IKN baru diharapkan dapat memaksimalkan potensi sumber daya daerah dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pertama-tama, Kota Jakarta secara objektif belum relevan untuk menjadi Ibukota Negara. Beberapa alasan yang mendukung pernyataan ini adalah:

- 1) Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, 16.704 jiwa/km², dibandingkan dengan rata-rata Indonesia 141 jiwa/km².
- 2) Jakarta merupakan kota terpadat ke-10 secara global pada tahun 2019, meskipun turun ke pada tahun 2020, 31 dari 416 kota besar di 57 negara berada di peringkat.
- 3) Banjir tahunan dan penurunan permukaan tanah adalah beberapa masalah geologi dan lingkungan utama Jakarta, yang menyebabkan sebagian besar kota berada di bawah permukaan laut. (KKRI, 2022).

OIKN telah merumuskan tujuan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai upaya untuk meratakan pertumbuhan ekonomi guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurut Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, studi kelayakan teknis yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2019 digunakan sebagai dasar untuk menentukan lokasi baru untuk IKN. Beberapa pertimbangan keunggulan wilayah yang menjadi dasar yang digunakan untuk mengirimkan IKN ke Kalimantan adalah:

- 1) Lokasinya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. ALKI II, alur laut kepulauan Indonesia, melintasi Selat

Makassar, yang merupakan jalur laut utama di seluruh negeri dan di seluruh wilayah.

- 2) Sangat banyak infrastruktur yang mendukung, termasuk bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik, serta infrastruktur tambahan seperti jaringan listrik dan ketersediaan air minum yang layak.
- 3) Di dekat dua kota pendukung yang saling berkembang, Balikpapan dan Samarinda.
- 4) Ketersediaan lahan yang cukup dan dikuasai oleh pemerintah untuk pengembangan IKN.
- 5) Risiko bencana alam yang minim. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang terciptanya 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Nusantara.

Selain itu, perencanaan IKN juga didasarkan pada rekomendasi hasil kajian cepat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 dan Kajian mendalam Peraturan KLHS yang disusun oleh Kementerian Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 (Cakti A, 2024).

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai memiliki dampak positif dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di luar Pulau Jawa. Diharapkan, relokasi ibukota negara ke Kalimantan dapat membuka kesempatan bisnis dan pekerjaan baru. Andrinof Chaniago, yang menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2014-2015, menyatakan bahwa Sumber daya manusia, Nusantara dapat mengatasi perbedaan sumber daya manusia antara Jawa dan luar Jawa. "Karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Bagi yang mampu, akhirnya pergi ke Jawa," kata Chaniago (Anam, K. 2022, January 28).

Di samping itu, ada juga dari berbagai pihak yang menolak rencana pemindahan Ibukota Negara dengan beragam alasan. Salah satunya adalah alasan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sugeng. Menurutnya, "Pemindahan ibu kota

negara ke Kalimantan berpotensi mengancam lingkungan, mengancam keberadaan fauna dan flora. Ini akan terjadi sebagai akibat dari pembangunan kota, pemukiman penduduk, bisnis, dan pasar. Hutan Kalimantan, yang merupakan paru-paru dunia, mungkin akan hanya menjadi kenangan karena ulah manusia." Jadi, infrastruktur dan relokasi ibukota di Nusantara dianggap memiliki potensi untuk mengganggu ekosistem hutan Kalimantan dan mengancam keberlangsungan flora dan fauna secara serius yang ada di Kalimantan. (HUMAS MKRI. 2022, 12 April).

Keputusan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara di tengah pandemi COVID-19 dianggap tergesa-gesa dan berbahaya, menurut sejumlah ahli ekonomi. Meskipun aspek hukumnya telah jelas, ada kekhawatiran bahwa pembangunan Nusantara akan terhambat oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik, terutama mengingat bahwa Presiden Jokowi akan berakhir masa jabatannya di masa 2024. Menurut Sulfikar Amir, profesor asosiasi NTU Singapore, memindahkan ibu kota ke Kalimantan bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi beban Jakarta. "Jadi jika pemindahan ibu kota dilakukan karena Jakarta terancam tenggelam, itu berarti pemerintah berusaha menghindari tanggung jawab atas masalah besar yang masih belum terselesaikan," ungkap Sulfikar. Sebagai seorang akademisi, Sulfikar tidak menentang rencana pemindahan IKN, tetapi ia menekankan bahwa alasan yang rasional dan proses pemindahan yang transparan sangat penting.

Karena ada banyak perspektif dan kepentingan yang berbeda dari semua pihak, pemindahan ibu kota negara menjadi perdebatan yang wajar di masyarakat. Sampai dengan tanggal 29 November 2022, saat ini, pembangunan akses jalan dan proses pembebasan lahan telah mencapai tingkat 70%. Selain itu, Presiden Jokowi berharap dapat menyelenggarakan upacara peringatan 17 Agustus 2024 di ibu kota baru (Argawati, 2022).

Mengenai perencanaan strategis yang telah dikemukakan diatas, sangat berkaitan secara ideologis dan simbolis dengan makna filosofis Pancasila. Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang bertujuan

untuk membangun ibu kota baru Indonesia, secara alami terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar ideologis negara Indonesia.

Dengan ini, kami menganalisis mengenai infrastruktur, kulturasi, serta transformasi yang terjadi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila, seperti yang berikut:

SILA	SIMBOL	MAKNA	PENJELASAN
1		Ketuhanan yang maha Esa	Visi IKN Nusantara adalah menjadi kota dunia yang berkelanjutan dan juga menjadi simbol identitas nasional (Zainal, I. (n.d.)). IKN juga dapat dijadikan simbol keberagaman seperti agama, etnis, atau ideologi sehingga dapat menyatukan sebuah bangsa dan menjadi objek kebanggaan nasional.
2		Kemanusiaan yang adil dan beradab	IKN dirancang untuk menjadi bagian simbol Rantai. Hal ini tercermin dari tujuan pembangunannya yang tidak hanya fokus pada aspek pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesetaraan, kesejahteraan, serta keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. (Zia Ulhaq, M. J., Darwis, M., & Rudiadi. 2023, January 1).
3		Persatuan Indonesia	Dengan nama "Nusantara", Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.
4		Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki hubungan yang erat dengan prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Proses pembangunan dan pengelolaan IKN melibatkan permusyawaratan dengan berbagai pemangku kepentingan, kebijaksanaan dalam pengelolaan, kepemimpinan yang terpusat, partisipasi masyarakat, dan transparansi.
5		Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Dalam proses pembangunan IKN, pemerintah berkomitmen untuk mengikuti aspek lingkungan, infrastruktur dan mobilitas warga, tata kelola pemerintahan desa, ekonomi desa, kualitas hidup warga desa, serta keterampilan dan inovasi desa yang setara (Humas Kemensetneg RI. 2023, November 7). Hal ini menandakan struktur pemerataan di IKN dapat berjalan sesuai makna Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 1.1 Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Makna dari sila-sila Pancasila

IKN diharapkan tidak hanya menjadi identitas nasional Indonesia, namun juga menjadikan Indonesia pusat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan Indonesia dengan mempercepat jalannya ekonomi dan transformasi sosial dan lingkungan. Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. (Rizqiyah, N. L. 2023). Ini

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat maritim. Kemajemukan budaya etnis dilandasi oleh pengakuan kemajemukan geografis.

Ibu Kota Nusantara (IKN) juga diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi sebagai kota dunia yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi Indonesia tetapi juga secara global. Melalui penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan pengelolaannya, Tujuan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah untuk menjadi representatif bagi kota-kota di seluruh dunia. Untuk memajukan ekonomi Indonesia di masa depan. Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, sebagai simbol identitas nasional, Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan etnis Indonesia yang diakui dan dihargai, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan hukum negara.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa konsep Selama berbagai presiden, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa telah menjadi perdebatan sampai saat ini. Namun, baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana pemindahan tersebut mendapatkan tindak lanjut yang nyata dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penetapan otoritas ibukota negara sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menunjukkan respons terhadap kemajuan era digitalisasi yang semakin memudahkan pelaksanaan pembangunan IKN. Proses pemindahan tersebut telah mencapai pencapaian signifikan, dengan proses pengosongan lahan dan pembangunan jalan arteri yang telah meraih jumlah hingga 70% per tanggal 29 November 2022. Visi Presiden Jokowi untuk menggelar upacara peringatan 17 Agustus tahun 2024 di Nusantara menambah semangat dalam proses pemindahan ibu kota.

Saat ini, lebih dari 80% dari tujuan pembangunan IKN telah tercapai, menjadikannya sebagai simbol identitas nasional yang tak terpisahkan dari kemajuan dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Relokasi ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah timur, diharapkan akan tercipta kesempatan yang lebih adil bagi daerah-daerah di luar Jawa untuk berkembang. Selain itu, pemindahan ini juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk menciptakan negara yang lebih maju dan berdaya saing. Selain manfaat ekonomi dan sosial, pemindahan ibu kota dari Jakarta juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang telah lama menjadi sorotan di ibu kota saat ini. Dengan perencanaan yang baik dan berbasis pada prinsip keberlanjutan, Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu menjadi kota berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com (2023, Agustus 15) 5 Sasaran Visi Indonesia Emas RPJPN 2025-2045: Masuk 5 Besar PDB dunia Klik selengkapnya di sini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685272/5-sasaran-visi-indonesia-emas-rpjpn-2025-2045-masuk-5-besar-pdb-dunia>.
- ANTARA News. (2024, March 19). OIKN: Tujuan pembangunan IKN untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Antaranews.com. Retrieved April 15, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/4016541/oikn-tujuan-pembangunan-ikn-untuk-pemerataan-pertumbuhan-ekonomi>
- Anam, K. (2022, January 28). Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini! CNBC Indonesia. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini>
- Ayundari, (2022, Januari 25). Urgensi pemindahan ibu kota negara Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN), from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Cakti, A. (2023, August 18). Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan IKN - ANTARA News. Antaranews.com. Retrieved April 15, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/3686634/mewujudkan-indonesia-emas-2045-melalui-pembangunan-ikn>
- Cakti, A (2024, March 19). OIKN: Tujuan pembangunan IKN untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. from <https://www.antaranews.com/berita/4016541/oikn-tujuan-pembangunan-ikn-untuk-pemerataan-pertumbuhan-ekonomi>

- Cawelti, J. G. (1969). The concept of formula in the study of popular literature. *Journal of Popular Culture*, 3(3), 381.
- Darmalaksana, W. (2020a). Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020c). Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis. Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1.
- Eddy Cahyono Sugiarto (Karo Humas Kemensetneg) (2022, Januari 24) IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City.
https://setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city
- Fadillah, N. (2022). Politik Hukum Daerah Khusus Ibukota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Tesis Magister, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia).
- Farisa, F. C. (2022, March 14). Bawa Tanah dan Air dari Kampung Akuarium ke IKN, Anies Singgung Warga yang Termarjinalkan. KOMPAS.com. Retrieved April 30, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/16042761/bawa-tanah-dan-air-dari-kampung-akuarium-ke-ikn-anies-singgung-warga-yang?page=all>
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021, June). IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).
- Herdiana, Dian. 2022. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8(1):1–30.
- Humas Kemensetneg RI. (2023, November 7). Pacu Pembangunan Infrastruktur Penting, Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan

Optimisme IKN. Sekretariat Negara. Retrieved April 20, 2024, from https://setneg.go.id/baca/index/pacu_pembangunan_infrastruktur_penting_pemerintah_berkomitmen_tingkatkan_optimisme_ikn

HUMAS MKRI. (2022, April 12). IKN Pindah ke Kalimantan Berisiko Merusak Lingkungan Hidup | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18127&menu=2>

Kamalina, A. R. (2023, August 15). 5 Sasaran Visi Indonesia Emas RPJPN 2025-2045: Masuk 5 Besar PDB dunia. Ekonomi. Retrieved April 15, 2024, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230815/9/1685272/5-sasaran-visi-indonesia-emas-rpjpn-2025-2045-masuk-5-besar-pdb-dunia>

Khoirul Anam, CNBC Indonesia (2022, January 28) Pro Kontra Ibu Kota Baru RI, Simak Perdebatan Ini! Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia resmi akan berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220128201730-4-311394/pro-kontra-ibu-kota-baru-ri-simak-perdebatan-ini>

Nainggolan, E. U. (2022, January 25). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2019). Metode penelitian kuantitatif.

Purnama, S. J., & Chotib. (2022, December 2). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA - (Analysis of The National Capital Relocation Policy). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13(2), 155-168.

Rumana, D. (n.d.). Pemindahan Ibukota Negara. Berkas DPR - berkas.dpr.go.id.

Suciatiningrum, Dini. 2019. "5 Masalah Jakarta Pemicu Pindahanya Ibu Kota."6Mei2019".<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/5-masalah-jakarta-pemicu-pindahanya-ibu-kota>

Sugiarto, E. C. (2022, January 24). IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City. Sekretariat Negara. Retrieved April 15, 2024, from https://setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city

Tysara, L. (2023, December 13). IKN Adalah Singkatan dari Ibu Kota Nusantara, Akan Selesai dan Pindah Kapan? Liputan6. Retrieved April 15, 2024, from <https://www.liputan6.com/hot/read/5479971/ikn-adalah-singkatan-dari-ibu-kota-nusantara-akan-selesai-dan-pindah-kapan?page=4>

Urgensi Infrastruktur Pendidikan Sebagai Wajah Peradaban Baru Ibu Kota Negara Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. (2023). *Journal Education Innovation (JEI)*, 1(1), 106-113.<https://jurnal.ypkpasid.org/index.php/jei/article/view/31>.